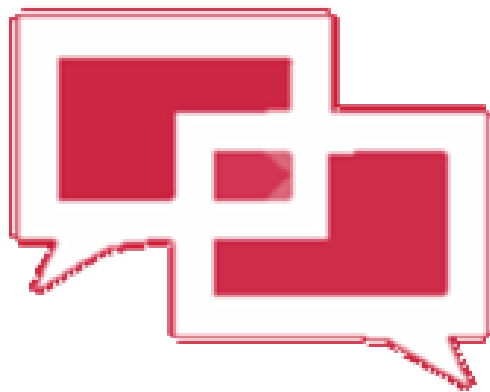


LAPORAN TAHUNAN

SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL – LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

SP4N – LAPOR!



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2021

1. PENGANTAR

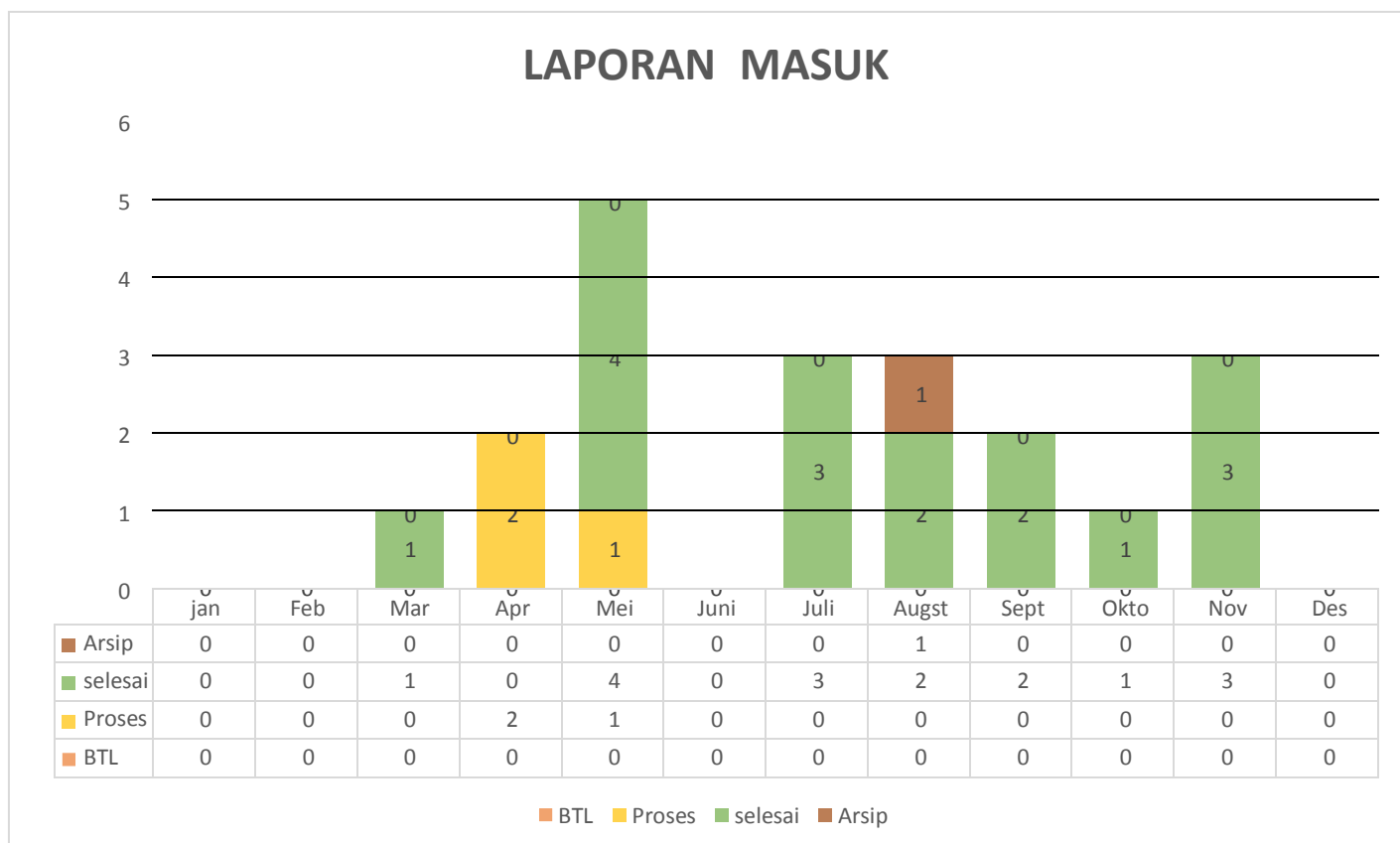
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) -Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan (khusus pengaduan di Kabupaten Bintan) yaitu website **www.sahara.lapor.go.id**, **SMS 1708(SAHARA (spasi) Isi Aduan)** , **Twitter @lapor1708** serta **aplikasi mobile (Android dan iOS)**.

LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015. Kemudian Kabupaten Bintan menerbitkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 47 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan SP4N – LAPOR.

Pada tahun 2021 pengelolaan SP4N – LAPOR! Pemerintah Kabupaten Bintan Jumlah Aduan/laporan 19 (Sembilan belas) ,sebanyak 18 (delapan belas) aduan/laporan yang di disposisi dan 1(satu) aduan /laporan diarsipkan (data terlampir).

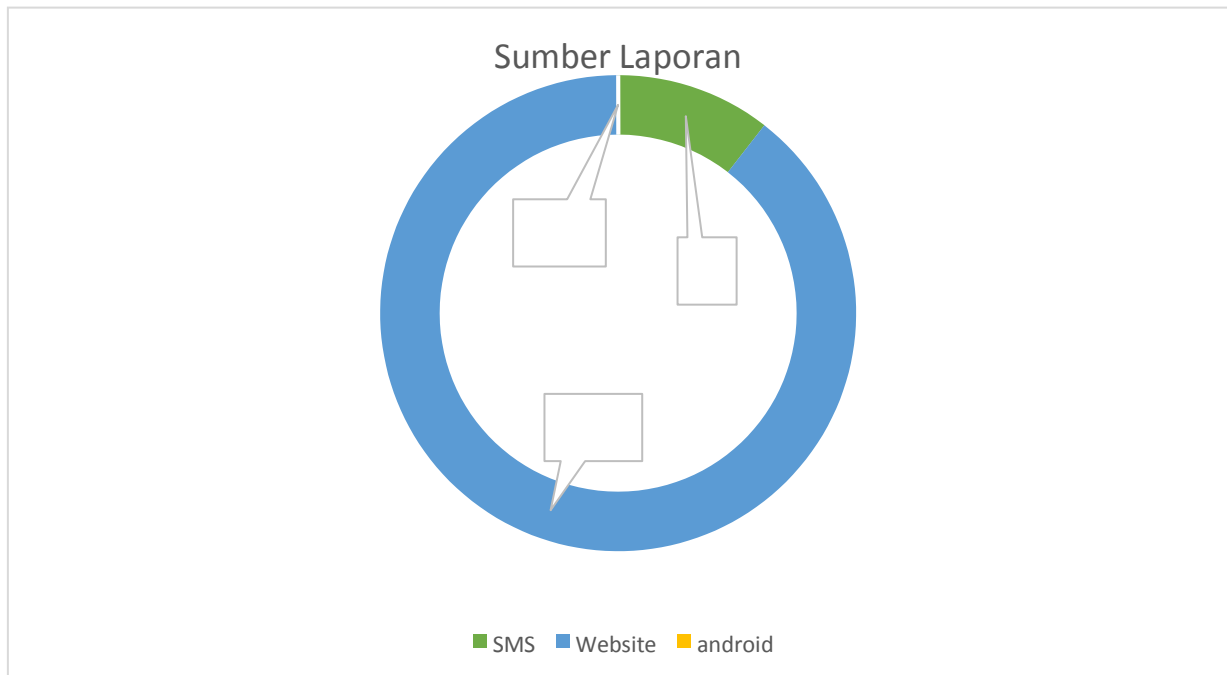
2. DATA DAN STATISTIK TAHUN 2021

2.1 LAPORAN MASUK PERBULAN



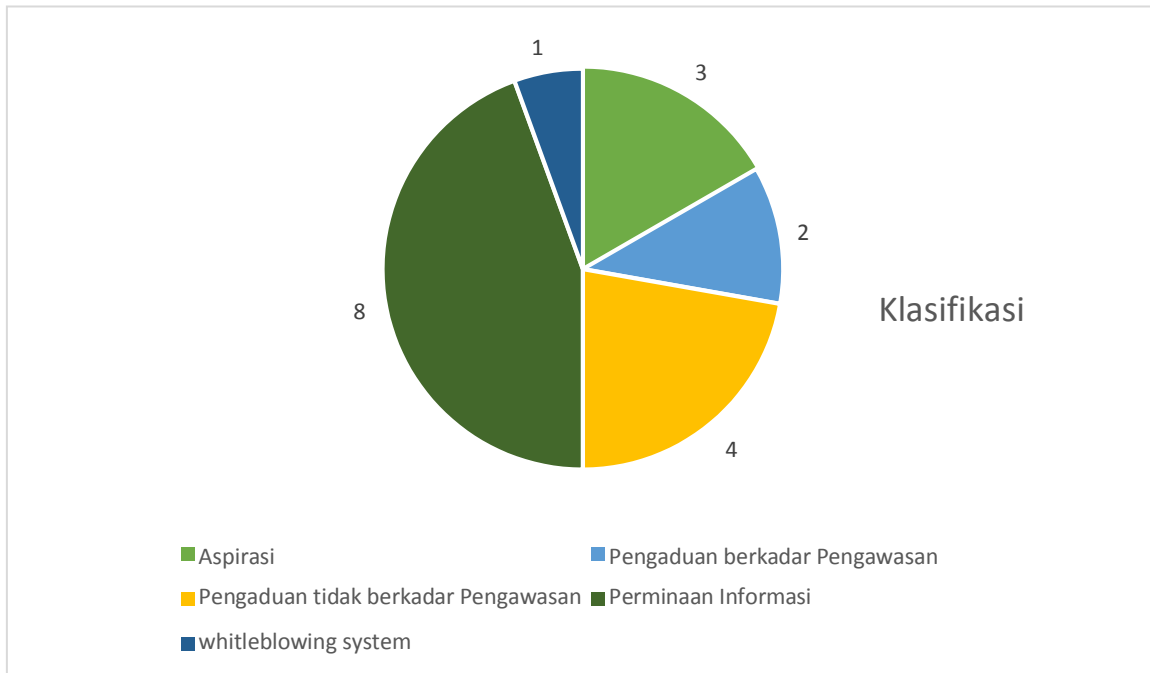
Dari data diatas menampilkan Laporan masuk setiap bulannya . tahun 2021 sebanyak 18 (Sembilan belas) laporan/aduan masuk dengan detail laporan selesai sejumlah 16 (enam belas) (warna hijau), 1(satu) (warna coklat) aduan /laporan diarsipkan, 2 (dua) laporan/Aduan yang sedang di proses , dan tidak ada laporan/Aduan belum ditindaklanjuti oleh OPD.

2.2 SUMBER LAPORAN



Sumber Laporan adalah media bagi pelapor untuk menyampaikan aduan/laporan mereka ke SP4N-LAPOR. sumber laporan melalui media SMS sejumlah 2 (dua), media website sejumlah 17 (tujuh belas) dan media android sejumlah 0 (nol). Selama tahun 2021

2.3 KLASIFIKASI LAPORAN



Klasifikasi Laporan adalah pengelompokkan aduan/Laporan berdasarkan ciri-ciri persamaan atas aduan/laporan tersebut. Ada banyak klasifikasi aduan/laporan dalam SP4N-LAPOR!, kami sampaikan data klasifikasi laporan yang sering diadukan/laporkan oleh pelapor pada pemerintah Kabupaten Bintan. Dengan data sebagai berikut :

Klasifikasi	jumlah	warna
Pengaduan Berkadar Pengawasan	2	biru
Pengaduan tidak Berkadar Pengawasan	4	kuning
Permintaan informasi	8	hijau tua
Aspirasi	3	hijau
Whitleblowing system	1	ungu

2.4 REKAPITULASI OPD YANG MENERIMA LAPORAN/ADUAN SELAMA TAHUN 2020

UNIT KERJA	PROSES	SELESAI	TOTAL	% TL
SEKRETARIAT DAERAH	2	5	7	100
SEKRETARIAT DPRD	0	1	1	100
DINAS KESEHATAN	0	2	2	100
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	0	1	1	100
DINAS KEBUDAYAAN DAN PRIWISATA	0	1	1	100
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	1	1	100
BADAN KEPEGAWAIAN DAN SDM	0	1	1	100
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	2	2	100
KECAMATAN BINTAN TIMUR	0	2	2	100

Dari data tersebut selama tahun 2020 trend pengaduan masyarakat hanya kepada 9 OPD, dan semua laporan yang masuk dan di disposisikan ke OPD tersebut, terdapat 2 laporan/aduan yang masih dalam proses di OPD terkait.

DATA ISI LAPORAN TAHUN 2021

Tracking ID	Tanggal Laporan Masuk	Nama Pelapor	Klasifikasi Laporan	Kategori Disposisi	Judul Laporan	Isi Laporan Akhir	Tipe Laporan (Anonim/Rahasia)	Sumber Laporan	Status Laporan
5596029	22 Mar 2021	I F T A	Permintaan Informasi	Pengadaan Barang/Jasa	Surat Edaran Pelaksanaan Belanja Pengadaan Langsung Lkpp Ri Pada Tahun Anggaran 2021	<p>Dear Bupati Bintan,</p> <p>Bersama ini kami mohon perkenan Bupati Bintan untuk menerbitkan surat edaran kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Bintan tentang pelaksanaan program belanja pengadaan langsung LKPP RI pada tahun anggaran 2021 berdasarkan surat keputusan kepala LKPP RI nomor 200 tahun 2020 dan surat edaran kepala LKPP RI nomor 31 tahun 2020 sebagaimana terlampir.</p> <p>Atas perhatian dan kesediaannya mengabulkan permohonan kami diucapkan terima kasih.</p> <p>Hormat kami, Hendry juliardian</p>	Anonim/Rahasia	Website	Ditutup oleh Pelapor
5630882	20 Apr 2021	Kang Bataleon Samsy	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pertanahan	Lahan Tidur Milik Pt Bmw	<p>Kepada yang terhormat pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Gubernur Kepulauan Riau .Mengkaji ulang terkait lahan tidur yg dimiliki PT BMW.di wilayah Toapaya Utara Berdasarkan program pemerintah dan instruksi BPN pusat kementerian akan adanya verifikasi HGB dan HGU diseluruh Indonesia. Khususnya Kepulauan Riau ada beberapa puluh HGB dan HGU yang akan diverifikasi salah satu satunya PT BMW.Pada peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2020 ada tahapan verifikasi disana tim verifikasi terdiri dari kanwil BPN, pemerintah setempat, Camat, Lurah, RT dan RW.Harapannya kiranya perusahaan - perusahaan yang mengklaim lahan 23000 hektar Luasnya.Agar perhatikan masyarakat, jangan mengambil keuntungan sendiri. Perusahaan perusahaan tersebut sebagai penghalang pembangunan di daerah, karena tidak sesuai dalam peruntukannya. Jika mereka sesuai dalam peruntukannya pastinya pembangunan berjalan pada mestinya...</p>		Website	Ditanggapi oleh Pelapor
5647904	7 May 2021	Kang Bataleon Samsy	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	BPHN	Hutan Lindung Di Miliki Perusahaan Dengan Surat SKGR	<p>Di wilayah Toapaya Utara RT 007 RW 003, didapati plang lahan perusahaan, dimana lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung. Dan perusahaan hanya mengantongi surat ganti rugi sejak tahun 1994 sampai saat ini tanpa pengelolaan / pemanfaatan lahan. Namun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten bungkam dengan permasalahan ini</p>	Anonim	Website	Ditutup oleh Sistem

5652281	12 May 2021	Meydia Hendra Yani	Whitleblowing System	Lainnya terkait Politik dan Hukum	Penyalahgunaan Wewenang Oleh Ketua DPRD Bintang	Ketua DPRD bintang terindikasi ikut melindungi serta membela masyarakat tertentu yang melanggar aturan pada pembangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) yang terletak di gesek, kecamatan toapaya,	Rahasia	Website	Ditutup oleh Sistem
5655293	17 May 2021	Jefri	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Topik Lainnya	Pembebasan Lahan Akses Jalan	Saya ingin menyampaikan permasalahan terkait lahan yang dibebaskan PEMDA Bintang melalui Dinas PUPR Bintang untuk akses jalan umum pada 2008 silam bahwa akses jalan tersebut berada diatas 2 bidang lahan milik kami dengan nomor sertifikat 00404/Tanjung Uban Selatan (an.rm.Daradjadi) dan 00391/Tanjung Uban Selatan (an.Kusumasto Subagjo, se) yang mana milik kami tersebut belum dibebaskan atau belum di ganti rugi oleh PEMDA Bintang, maka dari itu kami ingin PEMDA Bintang dapat menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan jalan tersebut dan sebelumnya kami telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan PEMDA Bintang dan kami diminta mengirimkan surat kepada Bupati Bintang namun sampai saat ini belum ada kejelasan dan tindaklanjut atas permasalahan tersebut, kami harap dengan laporan kami ini agar bisa segera diselesaikan permasalahan ini, yang mana kita ketahui admistrasi sangatlah penting apa lagi menyangkut aset negara Terimakasih.	Anonim Rahasia	Website	Ditutup oleh Sistem
5655360	17 May 2021	I F T A	Aspirasi	SP4N-LAPOR!	Surat Edaran Pelaksanaan Belanja Pengadaan Langsung LKPP Ri Pada Tahun Anggaran 2021	Dear bupati bintang,Bersama ini kami mohon perkenan bupati bintang untuk menerbitkan surat edaran kepada seluruh organisasi perangkat daerah se-kota tanjung pinang tentang pelaksanaan program belanja pengadaan langsung LKPP RI pada tahun anggaran 2021 berdasarkan surat keputusan kepala LKPP RI nomor 200 tahun 2020 dan surat edaran kepala LKPP RI nomor 31 tahun 2020 sebagaimana terlampir.Sebagai referensi, bersama ini kami lampirkan SE Gubernur Kepulauan Riau dan surat edaran/pemberitahuan dari SEKDA Karimun dan SEKDA Anambas terkait pelaksanaan bela pengadaan LKPP.Atas perhatian dan kesediaannya mengabulkan permohonan kami diucapkan terima kasih.Hormat kami,Hj	Anonim Rahasia	Website	Ditanggapi oleh Pelapor

5659006	21 May 2021	Fylsia	Pengaduan Berkadar Pengawasa n	Sertifikat Tanah	Lanjutan #5657993 Alashak Tanah Bermasalah	Dengan hormatLokasi tanah di Kota Kijang, Kabupaten Bintan, Kelurahan Gunung Lengkuas, Provinsi Kepulauan Riau.Peran utama adalah RW Kelurahan Gunung Lengkuas, an Muktar yang terlibat, saya kurang tahu persis apakah pihak Kelurahan dan kecamatan , BPN ada atau tidak, harus di cek ulang. Berdasarkan pembeli dan oknum / orang-orang yang sengaja menggunakan alashak aspal untuk kuasai diatas lahan kami. Yang pasti saya sangat kesulitan sekali untuk mengurus surat saya, saya sudah habis waktu, uang dan tenaga karena saya berada di Batam. Saudara yang di Kijang tidak sekolah jadi kurang paham apa yang dilakukan alm Muktar. Tanggal 29.01.2008 mulai pembuatan alashak ada kwitansi terima 8 juta dari alm Senlong (kakak saya), tanggal 29 .4.2008 ada terima uang 40 juta untuk buat sertifikat. Tanggal 4 juni 2009 saya pertama kali melihat alashak yang diterbitkan bpk Muktar semua keluaran tahun 1983, sudah pasti palsu , alashak aspal di terima di BPN Kabupaten Bintan berdasarkan tanda terima bpk Sukamto,(saya lampirkan tanda terimanya). Saya minta fotocopy nya. Tapi terakhir dengar sudah ditarik kembali oleh bpk Muktar alashak aspalnya.Hormat sayaFylsia	Rahasia	Website	Ditutup oleh Sistem
---------	-------------	--------	--------------------------------	------------------	--	--	---------	---------	---------------------

5712847	5 Jul 2021	Muhamad Aditya Nofrianda	Permintaan Informasi	Pertanian dan Peternakan	Apakah Ada Pelaksanaan Vaksinasi Hewan Peliharaan Gratis Di Bintan?	<p>Kepada pihak dinas ketahanan pangan dan pertanian kabupaten bintang Atau pihak puskesmas bintang Atau pihak lainnya yang membawahi urusan kesehatan hewan di kabupaten bintang Izin bertanya, apakah di bintang tersedia program vaksinasi gratis atau vaksinasi massal dengan biaya subsidi kepada hewan peliharaan masyarakat bintang maupun masyarakat tanjungpinang? Saya melihat banyak berita mengenai puskesmas di kota lainnya seperti tangerang dan jakarta selatan yang mengadakan program vaksinasi gratis massal kepada hewan peliharaan. Selain itu, saya juga banyak mendapat informasi dari pecinta hewan di kota lainnya bahwa hewan peliharaan dapat dibawa ke puskesmas terdekat untuk dilakukan pengecekan kesehatan, pengobatan, vaksinasi, sterilisasi, dan lain-lain. Umumnya vaksinasi dan sterilisasi di puskesmas dikenakan biaya subsidi sehingga lebih murah dari klinik dokter hewan swasta. Apakah puskesmas di bintang juga melayani pemeriksaan hewan peliharaan dengan biaya subsidi seperti di puskesmas kota-kota lainnya di indonesia? Selain itu, saya juga menyarankan agar puskesmas kabupaten bintang lebih aktif dalam menyampaikan informasi. Minim sekali informasi yang bisa saya dapatkan mengenai puskesmas kabupaten bintang. Saya berharap juga puskesmas kabupaten bintang sama tugasnya dengan puskesmas kota-kota lainnya yaitu tidak hanya melayani hewan ternak tetapi juga hewan peliharaan. Bahkan puskesmas kota lainnya mempunyai akun sosial media untuk menyampaikan informasi seperti akun instagram puskesmas kabupaten bandung barat, kota pontianak, sampai kota pangkalpinang. Instagram puskesmas kbb juga memberi informasi 9 juni kemarin diadakan vaksinasi rabies gratis di puskesmas kbb. Saya tidak menemukan akun media sosial puskesmas kabupaten bintang. Mungkin begitu bapak/ibu. Jika ada program vaksinasi gratis atau dengan biaya subsidi di puskesmas bintang, tolong informasinya disebarluaskan. Baik gratis ataupun dengan biaya subsidi, tolong diberitahu. Tolong dibuatkan akun sosial media puskesmas bintang seperti kota lainnya. Jika programnya tidak ada, mohon sekiranya bisa direncanakan agar masyarakat yang memiliki hewan peliharaan di bintang dapat merasakan pelayanan yang sama dengan masyarakat di kota lainnya. Terima kasih.</p>	Anonim	Website	Ditutup oleh Pelapor
5718225	7 Jul 2021	Ingrid Anwar	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pengaduan Website tentang COVID-19	Laporan Covid19	<p>Salam sejahtera. Berikut saya laporkan bahwa saat ini kantor kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang Provinsi KEPRI, ada 5 orang pegawai yang terpapar covid19 dan sudah dinyatakan positif, kantor tidak ditutup dan beraktifitas seperti biasa. Tidak ada indikasi untuk ditindaklanjuti, mohon di follow up untuk keselamatan masyarakat.</p>	Anonim	Website	Ditutup oleh Sistem

5729424	12 Jul 2021	Yul	Permintaan Informasi	Lainnya terkait Kesehatan	Insentif JKN Untuk Pemberi Pelayanan Kesehatan di puskesmas	Selamat sore bapak/ibu, saya ingin bertanya tentang insentif atau jasa pemberi pelayanan kesehatan di FKTP, apakah dokter, bidan dan perawat THL di FKTP dengan perjanjian kerja SK yang dikeluarkan Dinas Kesehatan kabupaten tidak berhak untuk mendapatkan jasa pemberi layanan kesehatan di FKTP dengan sumber dana JKN. Karena yang berhak mendapatkan insentif menurut permenkes 21 tahun 2016 adalah pemberi pelayanan kesehatan, PNS, pegawai tidak tetap dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Apakah kami tidak termasuk yang berhak mendapatkan insentif atau jasa dari dana kapitasi? Karena dari dinas kesehatan kabupaten bintang provinsi kepri mengatakan kami tidak termasuk dan tidak mendapatkan jasa pelayanan dana kapitasi. Mohon pencerahannya	Anonim Rahasia	Website	Ditutup oleh Sistem
5785294	25 Aug 2021	628526973xxx x	Permintaan Informasi	CPNS	Tes SKD CPNS di Wilayah Domisili Peserta	BKN saya Annisa Nurmulyasari, salah satu peserta CPNS 2021. Saya mendaftar pada lingkungan pemerintahan Kabupaten Bintang. Ketika mendaftar saya tidak bisa memilih lokasi ujian SKD, tapi BKN sebelumnya sudah mengumumkan bahwa SKD akan ikut wilayah domisili. Jadi, saya kira lokasi ujian di Bintang akan diubah mengikuti domisili saya, tapi kenyataannya belum diubah. Pada masa pandemik ini, saya yang merupakan penyintas covid belum bisa divaksin. Jadi, bagaimana terkait hal tersebut?		SMS	Ditutup oleh Sistem
5785379	25 Aug 2021	628526973xxx x				BKN Saya salah satu peserta cpns 2021. Saya mendaftar pd Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintang. Apakah anda bisa membantu terkait lokasi tes SKD sayayg tidak bisa mengikuti lokasi domisili saya?		SMS	Diarsipkan oleh Admin
5788604	26 Aug 2021	I F T A	Permintaan Informasi	SP4N-LAPOR!	Permintaan Softcopy (Format Excel) Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2022 Atau 2021.	Dear bupati bintang, Bersama ini kami sampaikan permintaan softcopy (format excel) standar satuan harga pemerintah daerah kabupaten bintang tahun 2022 atau 2021. Atas perhatian dan perkenannya mengabulkan permohonan kami diucapkan terima kasih. Hormat kami, Hj	Rahasia	Website	Ditutup oleh Sistem

5805401	4 Sep 2021	I F T A	Aspirasi	SP4N-LAPOR!	Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintang Tidak Ada Yang Melaksanakan Program Bela Pengadaan Lkpp Ri	Kepada bupati bintang, Menindaklanjuti surat keputusan kepala lkpp ri nomor 200 tahun 2020 tentang program bela pengadaan dan surat edaran kepala lkpp ri nomor 31 tahun 2020 tentang pelaksanaan program bela pengadaan. Agar program bela pengadaan lkpp ri dapat dilaksanakan oleh setiap kementerian/ lembaga/ perangkat daerah di seluruh indonesia dan khususnya di provinsi kepulauan riau sejak tahun anggaran 2021, maka dasar hukum pelaksanaan program bela pengadaan lkpp ri diperkuat dengan :1. Surat edaran komisi pemberantasan korupsi ri nomor 11 tahun 2021 tentang pencegahan korupsi melalui aplikasi bela (belanja langsung) pengadaan lkpp ri;2. Surat edaran bersama menteri dalam negeri ri dan kepala lkpp ri nomor nomor 027/2929/sj dan nomor 1 tahun 2021 tanggal 11 mei 2021 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan program bela pengadaan;3. Surat lkpp ri nomor 11669/ka/06/2021 tanggal 15 juni 2021 tentang pelaksanaan program bela pengadaan di provinsi/kabupaten/kota;4. Surat edaran gubernur kepulauan riau nomor 027/745.1/b.pbj-set/2021 tanggal 23 april 2021 tentang pelaksanaan program bela pengadaan; Namun sangat disayangkan bahwa sampai detik ini tidak ada satupun organisasi perangkat daerah di kabupaten bintang yang telah melaksanakan program bela pengadaan lkpp ini. Fakta ini menunjukkan bahwa organisasi perangkat daerah di kabupaten bintang telah melakukan pembangkangan terhadap institusi komisi pemberantasan korupsi ri, kementerian dalam negeri ri, lkpp ri, dan pemerintah provinsi kepulauan riau. Padahal ketua kpk ri di dalam surat edaran nomor 11 tahun 2021 telah menyatakan bahwa penggunaan bela pengadaan dapat menghilangkan praktek mark up harga barang dan jasa serta pembelian fiktif karena harga barang/jasa dan penyedia tayang secara elektronik. Sangat kuat dugaan kenapa organisasi perangkat daerah di kabupaten bintang tidak melaksanakan program bela pengadaan adalah karena masih menjalankan praktek mark up harga dan pembelian fiktif barang/ jasa. Berkenaan hal tersebut diatas, kami sangat mengharapkan bupati bintang dapat mengambil tindakan tegas dengan menginstruksikan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah di kabupaten bintang untuk melaksanakan program bela pengadaan lkpp pada kesempatan pertama. Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan regulasi terkait program bela pengadaan lkpp ri dapat diunduh melalui link/ url google drive dibawah ini : https://drive.google.com/drive/folders/1xodgfe6vjxbdzmocxq6p8e4yh7uyby5u?usp=sharing Demikian laporan ini disampaikan. Atas perhatian dan kesediaan bupati bintang menindaklanjuti laporan kami ini diucapkan terima kasih. Hormat kami, *hj*	Anonim/Rahasia	Website	Ditutup oleh Sistem
---------	------------	---------	----------	-------------	--	--	----------------	---------	---------------------

5824302	16 Sep 2021	I F T A	Permintaan Informasi	SP4N-LAPOR!	Mohon Nomor Kontak Pengrajin/pedagang Grosir Souvenir Khas Kepulauan Riau	Dear kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten bintang,Bersama ini kami mohon daftar nomor handphone/whatsapp atau email yang aktif dari para pengrajin/pedagang grosir souvenir khas kepulauan riau yang berdomisili di kabupaten bintang.Atas perhatian dan kesediaannya mengabulkan permohonan kami diucapkan terima kasih.Rgds,Hj	Rahasia	Website	Ditutup oleh Sistem
5862755	15 Oct 2021	Dedy Supriyanto	Aspirasi	Infrastruktur Jalan	Pembangunan Jalan	Saya sebagai perwakilan warga Kabupaten Bintang, Kecamatan Bintang Utara, Kelurahan Tanjung Uban Timur RT001 RW001, hendak mengusulkan pembuatan jalan raya di daerah tempat kami. Kerana jalan tempat kami masih berupa jalan tanah dan yang di mana jalan tersebut menghubungkan antara Kelurahan kami dengan Desa sebelah (Desa Lancang Kuning). Dan kami berharap permohonan ini dapat di setujui oleh Pemerintah dan segera di buatkan jalan, terimakasih atas perhatiannya.		Website	Ditutup oleh Sistem
5890331	11 Nov 2021	I F T A	Permintaan Informasi	SP4N-LAPOR!	Permohonan Informasi Publik Berupa Peraturan Bupati Bintang Nomor Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022 Beserta Seluruh Lampirannya	Kepada yth : bupati bintang,Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dokumen Standar Satuan Harga (SSH) pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota adalah informasi publik yang tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dan oleh sebab itu dokumen Standar Satuan Harga (sSSH) pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib diberikan kepada pemohon informasi publik.Berkenaan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan permohonan informasi publik berupa peraturan bupati bintang nomor Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga pemerintah Kabupaten Bintang tahun 2022 beserta seluruh lampirannya.Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kesediaannya mengabulkan permohonan kami pada kesempatan pertama kami ucapkan terima kasih.Hormat kami,Pemohon informasi publikHendry	Rahasia	Website	Ditutup oleh Pelapor

5893515	15 Nov 2021	Anggian Suhandi Adiliansya Tampu Bolon	Permintaan Informasi	Pelayanan Kesehatan lain yang terdampak akibat COVID-19	Corona Atau Covid-19	Maaf Bapak ibu. Adik saya dinyatakan positif oleh Puskesmas atau RSUD sementara kami meminta hasil Lab PCR nya tidak dikasih, hanya dikasih surat print yang hanya berisi alamat-alamat suratnya tanpa Kop surat dan hanya stempel dan tanda tangan tetapi tidak ada nama penanggungjawabnya. makan kami melakukan PCR ke laboratorium lain yang terdaftar atau legalitas nya ada dan hasilnya negatif. Sampai saat ini pihak Puskesmas tetap melakukan PCR ulang.. Adik saya sampai dicutikan 5 hari karena masalah ini. Saya mohon untuk pihak Intansi terkait mohon ditindak lanjuti secara profesional dan terbuka. Jika memang bener positif kami ikut peraturan. Tapi harus ada bukti yang nyata.	Rahasia	Website	Ditutup oleh Sistem
5898983	20 Nov 2021	I F T A	Pengaduan Berkadar Pengawasaan	SP4N-LAPOR!	Pelanggaran/penyimpangan Terhadap Peraturan Perundangan Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Serta Dugaan Kkn Dan Pembohongan Publik Atau Menyebarkan Kabar/ Berita Bohong Melalui Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kerja Pemilihan Paket Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Ukpbj Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2021	Kepada yth : bupati bintang Dengan hormat, Bahwa kami dengan menggunakan bendera penyedia perorangan atas nama PD.SIPLAH KEPRI telah mengikuti tender “Belanja hibah barang kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan” pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintang yang dilaksanakan oleh “Kelompok kerja pemilihan paket pekerjaan belanja hibah barang kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan UKPBJ Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bintang tahun anggaran 2021. Namun penawaran kami digugurkan dengan alasan “1. Pupuk npk 15 15 15 yang ditawarkan tidak memenuhi spesifikasi yang ditawarkan, yakni : kandungan minimal 1% sulfur (dibrosur/gambar maupun hasil pemeriksaan lab.) 2. Surat dukungan distributor hanya untuk 2 item pekerjaan, item pekerjaan pupuk 15 09 20, tidak disampaikan”. Tindakan pokja ini telah memenuhi delik unsur pidana melakukan pembohongan publik/ menyebarkan kabar/ berita bohong. Karena faktanya berdasarkan struk pengiriman dokumen penawaran yang tersimpan didalam SPSE (copy dokumen terlampir), PD.SIPLAH KEPRI telah melampirkan surat dukungan dan jaminan ketersediaan barang pupuk NPK 15 09 20 dengan nama dokumen “surat dukungan NPK 15 09 20.pdf” dan surat keterangan spesifikasi pupuk NPK bermaterai Rp.10.000,00 dengan surat nomor 108/MAS/XI/2021 tanggal 12 november 2021 dimana didalam surat tersebut dinyatakan bahwa pupuk NPK 15 15 15 memiliki kandungan sulfur minimal 1% dengan nama dokumen “surat keterangan spesifikasi pupuk NPK CV. MAS.pdf”. Terkait hal ini kami melalui PD.SIPLAH KEPRI telah menerbitkan surat sanggahan kepada pokja (dokumen terlampir). Berkenaan hal tersebut, bersama ini kami laporkan pelanggaran/penyimpangan terhadap peraturan perundangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta dugaan KKN dan pembohongan publik atau menyebarkan kabar/ berita bohong melalui transaksi elektronik yang dilakukan oleh kelompok kerja pemilihan paket pekerjaan belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan ukpjb bagian pengadaan barang dan jasa kabupaten bintang tahun anggaran 2021. Adapun dasar laporan kami adalah peraturan perundangan terkait perizinan usaha dan pengadaan barang/jasa pemerintah yakni :1.	Rahasia	Website	Ditutup oleh Sistem

						Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik3. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja;4. Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;5. Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan;6. Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;7. P			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BINTAN



AUPA SAMAKE, S.Kom, MM
Pembina Tk I
NIP. 19760820 200604 1 016